

Redenominasi dan Sanering Mata Uang Rupiah (IDR): Analisis Komparasi

Currency Redenomination and Sanering Rupiah (IDR): Comparative Analysis

Joseph J.A. Turambi ^a

Program Studi Manajemen FE Unika De La Salle Manado

ARTICLES INFORMATION

E B B A N K

Vol. 6, No. 1, Juli 2015
Halaman : 91 – 99
© LP3M STIEBBANK
ISSN (online) : 2442 - 4439
ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

Redenomination, Sanering

JEL classifications :

E50, E60

Contact Author :

^a jeffiturambi@yahoo.co.id

ABSTRACT

Redenominasi mata uang adalah tindakan dengan maksud menurunkan nilai moneter dari mata uang tertentu secara tunai. Tindakan ini telah dilakukan untuk pertama kalinya hampir seratus tahun yang lalu. Jerman adalah negara pertama yang melakukan tindakan ini pada tahun 1923. Negara Terbaru yang mengambil tindakan untuk redenominasi adalah Venezuela pada tahun 2008. Berdasarkan data dari sekitar 50 negara di dunia yang telah melakukan redenominasi mata uangnya, beberapa negara tertentu bahkan telah melakukan beberapa kali redenominasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat analisis komparatif dari redenominasi mata uang mata uang di Indonesia Rupiah (IDR) pada tahun 2014, dan beberapa keadaan redenominasi sebelumnya di dunia.

Currency redenomination was an act with the intention of lowering the monetary value of a particular currency in cash. This action has been done for the first time nearly a hundred years ago. Germany was the first country that perform this action in 1923. The Latest state that take action for redenomination is Venezuela in 2008. Based on data from about 50 countries in the world that has done its currency redenomination, even in some certain countries have done many times redenomination. This study aims to make a comparative analysis of the currency redenomination of Indonesia's currency Rupiah (IDR) in 2014, and some previous state redenomination in the world.

PENDAHULUAN

Simpang-siur pemahaman tentang redenominasi dan sanering masih terus berlangsung di kalangan masyarakat. Di Indonesia, wacana redenominasi masih mengundang kekhawatiran masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena sebagian warga mengira penghapusan nol sama dengan pengurangan nilai mata uang atau sanering. Sebagian masyarakat bahkan di kalangan para pejabat, dan cendekiawan sekalipun masih sering menyamakan pengertian redenominasi dan sanering sebagai suatu tindakan moneter yang sama dan berimplikasi sama terhadap suatu kebijakan moneter. Masyarakat seringkali menganggap pengertian 'redenominasi' sama dengan 'sanering'. Padahal kedua istilah tersebut berbeda, (Situs Sekretariat Negara (Setneg), 2013).

Redenominasi dan sanering telah terjadi sejak hampir seabad yang lalu. Duca Iona (2012) melakukan penelitian implementasi redenominasi mata uang di beberapa negara di dunia. Hampir 50 negara di dunia telah melakukan redenominasi dalam konteks pembaharuan ekonomi di masing-masing negara. Hasil temuannya bahwa redenominasi tidak mengubah substansi mata uang, namun bagi Iona penting untuk melihat lebih jauh efek atau akibat psikologis baik secara nasional maupun internasional. Iona melakukan penelusuran dengan mencari manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan pilihan timing implementasi redenominasi selain aspek teknis.

Redenominasi

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Asumsi yang mendasari redenominasi adalah akumulasi inflasi selang periode tertentu sehingga jumlah satuan moneter yang sama perlahan-lahan memiliki daya beli yang semakin melemah dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, harga produk dan jasa harus dituliskan dengan jumlah angka yang lebih besar. Redenominasi diperlukan untuk memperbaiki atau mengatasi inefisiensi yang bisa terjadi akibat makin tingginya waktu dan biaya transaksi yang diperlukan karena nilai transaksi di tengah masyarakat semakin lama semakin besar. Terlebih transaksi yang mengandalkan pembayaran tunai.

Pernahkah anda membayangkan akan menerima gaji sebesar Rp 1.500 per bulan? Kemungkinan besar hal tersebut akan terjadi kira-kira 5 tahun kedepan, jika saat ini gaji anda sebesar Rp 1,5 juta. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sedang melakukan pembahasan internal untuk dapat melakukan kebijakan redenominasi. Redenominasi atau pengurangan nilai pecahan tanpa mengurangi nilai dari uang tersebut. Teknisnya, angka nol dalam sebuah pecahan akan dikurangi, contoh; jika dikurangi 3 angka nol maka Rp 1.000.000 akan menjadi Rp 1.000. demikian seterusnya. Contoh lain: harga-harga barang di toko-toko akan tercatat 2 label harga, yakni dengan rupiah lama dan dengan rupiah baru. Jika nol-nya disederhanakan 3 digit, maka jikalau harga barangnya Rp 10.000 maka akan dibuat dua label harga yakni Rp 10.000 untuk rupiah lama dan Rp 10 untuk rupiah baru.

Tabel 1. Redenominasi mata uang di dunia dengan penyebab utama inflasi

Tahun	Negara	Mata Uang	Redenominasi	Penyebab Utama
2008	Venezuela	Bolivar Fuerte	1,000	Inflasi
2007	Ghana	Cedi	10,000	Inflasi
2006	Azerbaijan	Manat	5,000	Inflasi
2005	Turkey	Lira	1,000,000	Inflasi
2005	Romania	Leu	10,000	Inflasi
2000	Belarus	Belarussian Rouble	1,000	Inflasi
1999	Bulgaria	Bulgarian Lev	1,000	Inflasi
1998	Russia	Russian Rouble	1,000	Inflasi
1996	Ukraine	Hryvnia	100,000	Inflasi

Dalam teori ekonomi, redenominasi tidak menimbulkan dampak apapun. Berbeda dengan sanering dan devaluasi yang punya dampak langsung terhadap nilai tukar dari uang yang dipegang oleh masyarakat, juga memiliki dampak ekonomi lainnya akibat lanjutan dari kebijakan ini yang meliputi ekspor-impor, inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi (Bapenas, 2013).

Rupiah sebagai mata uang Indonesia memiliki satuan-satuan di bawah Rupiah yang lebih kecil. Satuan-satuan yang lebih kecil dari Rupiah ini berlaku pada masa kolonial Belanda. Satuan-satuan terkecil di bawah rupiah ini tidak digunakan lagi. Ini terjadi karena penurunan nilai Rupiah yang menghilangkan nilai satuan yang lebih kecil. Nilai-nilai satuan yang pernah digunakan dalam Rupiah antara lain: Sen; Nilainya seperseratus Rupiah. Cepeng, hepeng; nilainya seperempat sen. Peser; nilainya setengah sen. Pincang; nilainya satu setengah sen. Gobang; nilainya dua setengah sen. Picis; nilainya sepuluh sen, dan Tali; nilainya seperempat rupiah. Pecahan mata uang Indonesia Rupiah atau dengan kode internasional yaitu (IDR); dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia. Pecahan Rupiah ini terdiri dari 10 nilai nominal, yaitu: 100 (seratus), 200 (dua ratus), 500 (lima ratus), 1.000 (seribu), 2.000 (dua ribu), 5.000 (lima ribu), 10.000 (sepuluh ribu), 20.000 (duapuluh ribu), 50.000 (limapuluh ribu), dan 100.000 (seratus ribu) rupiah.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sungguh memprihatinkan sehingga mengalami hiperinflasi karena banyaknya mata uang Indonesia yang beredar. Ingat bahwa terdapat 3 (tiga) mata uang Indonesia yang berlaku pada masa kemerdekaan; mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank. Pada tanggal 1 Oktober 1945 ketiga mata uang tersebut ditetapkan dan diberlakukan sebagai mata uang sah pada waktu itu.

Kebijakan redenominasi dapat meningkatkan martabat bangsa dengan meringkas digit uang tanpa mengurangi nilai mata uang. Saat ini di Asia Tenggara hanya Indonesia dan Vietnam saja yang memiliki pecahan mata uang hingga 5 digit. Dengan kebijakan redenominasi berupa menghilangkan tiga angka nol (3 digit), maka nilai kurs baru rupiah terhadap mata uang negara lain akan mengalami penyesuaian nominal, meskipun daya belinya tidak berubah. (Wahyu Daniel, 2013).

Tujuan dari redenominasi mata uang adalah menyederhanakan pemahaman bahwa jumlah uang yang sungguh sangat besar. Mengurangi nilai tukar paritas; dengan membagi rupiah saat ini dengan seribu, berarti mengurangi nilai tukar paritas dari Rp/USD = 10.000:1 menjadi 10:1. Tujuan lain redenominasi adalah menyederhanakan perhitungan aritmatika dari jumlah yang dinyatakan dalam mata uang nasional. Memfasilitasi transaksi yang dilakukan dengan koin dan uang kertas. Hal ini lebih mudah untuk membayar dengan 1 atau 10 rupiah dibandingkan dengan 1.000 atau 10.000 rupiah. Efisiensi penggunaan perhitungan dan akuntansi sistem pencatatan. Meninggalkan konsekuensi terjadinya inflasi di masa lalu karena memiliki mata uang tertentu, dan memperkuat kepercayaan di bidang moneter. Meningkatkan persepsi individu terhadap perekonomian nasional dan, sebagai konsekuensinya, memperkuat keyakinan atas mata uang. Hal ini juga memberikan insentif yang lebih besar bagi bank sentral untuk mempertahankan nilai tukar Rp10 = US \$1 bukan dari Rp 10.000 = US \$ 1.

Tujuan-tujuan redenominasi di atas adalah tujuan jangka pendek dari bank sentral, sedangkan tujuan utama redenominasi adalah memberikan kebebasan kepada bank sentral untuk melakukan kebijakan lebih besar yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan ekonomi negara (nasional), dan penguatan rupiah. Perekonomian nasional Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, dan berkesinambungan hingga periode 8 tahun terakhir ini telah mencapai rata-rata peningkatan sebesar 5,73% dan mampu keluar dari dampak resesi global pada tahun 2008.

Belarusia, Bulgaria, Polandia, Turki, Rusia, Argentina, Brazil dan Israel adalah sebagian dari beberapa negara yang telah melakukan redenominasi untuk menghindari repotnya masyarakat menggunakan uang lama, dan uang redenominasi yang baru. Cara ini digunakan untuk menghindari kebingungan orang atas peredaran uang lama dan mata uang baru. Uang baru dicetak dengan menggunakan corak dan warna yang mirip dengan uang lama. Hampir sembilan

puluh tahun, sejak Jerman meredenominasi nilai mata uangnya (1923), Romania meredenominasi 4 digit angka nol dari nilai mata uangnya (2005,) yaitu LEU; mata uang lama Romanian Leu menjadi RON (Romanian New Leu). Sejak 1 Juli 2005, Romania mencetak 6 jenis uang kertas dan 4 jenis uang logam yang digunakan hingga Romania menggunakan Euro. Di Polandia redenominasi nilai mata uang Zloty terjadi pada tahun 1995 dengan meredenominasi 4 digit angka nol.

Tabel 2. Redenominasi mata uang di dunia sejak tahun 1923

Negara	Tahun	Mata Uang (lama) dan Nilai Mata Uang baru	Jumlah angka nol (0) yang dihilangkan
Afganistan	2002	1.000 Afgani = 1 Afgani (baru)	3
Albania	1965	10 Leke (lama) = 1 Lek (baru)	1
Angola	1995	1.000 Novas Kwanzas = 1 Kwanza Reajustado	3
	1999	1.000.000 Kwanzas Reajustados = 1 Kwanza	6
Argentina	1970	100 Pesos = 1 Peso Ley	2
	1983	10.000 Pesos Ley = 1 Peso Argentino (baru)	4
	1985	1.000 Pesos Argentinos = 1 Austral	3
	1992	10.000 Australes = 1 Peso Convertible (baru)	4
Azerbaijan	1992	10 Soviet Rubles = 1 Manat (baru)	1
Bahrain	1965	10 Gulf Rupees = 1 Dinar (baru)	1
Belarus	1992	10 Soviet Rubles = 1 Rubel (baru)	1
	2000	1.000 Rubles = 1 Rubel (baru)	3
Bolivia	1963	1.000 Bolivianos = 1 Peso Boliviano (baru)	3
	1987	1.000.000 Pesos bolivianos = 1 Boliviano	6
Brazil	1967	1.000 Cruzeiros = 1 Cruzeiro (baru)	3
	1970	1.000 Bruzeiros = 1 Cruzeiro	3
	1986	1.000 Cruzeiros = 1 Cruzado	3
	1989	1.000 Cruzados = 1 Cruzado	3
	1990	1 Cruzado = 1 Cruzeiro	1
	1993	1.000 Cruzeiro = 1 Cruzeiro Real	3
	1994	2.750 Cruzeiros Reals = 1 Real	3
Bulgaria	1962	10 Leva (lama) = 1 Leva (baru)	1
	1999	1.000 Leva (lama) = 1 Leva (baru)	3
Chile	1960	1000 Peso = 1 Escude	3
	1975	1000 Escudo = 1 Peso	3
China	1955	1.000 Yuan (lama) = 1 Yuan (baru)	4
Croatia	1994	1000 Dinara = 1 Kuna	3
Congo	1967	1.000 Congolese Francs = 1 Zaire	3
	1993	3.000.000 Zaires = 1 Zaire (baru)	6
	1998	100.000 Zaire = 1 Frans Congolaise	5
Estonia	1992	10 Rubles = 1 Kroon	1
Finlandia	1963	100 Markka (lama) = 1 Markka (baru)	1
Perancis	1960	100 Francs (lama) = 1 Franc (baru)	2
Georgia	1995	1.000.000 Kuponi = 1 Lari	6
Jerman	1923	1.000.000.000.000 Mark = 1 Rentenmark	12
	1948	10 Reichsmark = 1 Deutsche Mark	1
Yunani	1954	1.000 Drachmai = 1 Drachma (baru)	3
Guinea	1971	10 Francs = 1 Syli	1
Hungaria	1946	400.000 Quadrillion Pengoe = 1 Forint	4
Islandia	1981	100 Kronur = 1 Krona	2
Israel	1948	1.000 Prutot = 1 Pound	3
	1960	100 Agorot = 1 Pound	2
	1980	10 Pounds = 1 Sheqel	1
	1985	1.000 Shegalim = 1 Sheqel (baru)	3
Kirgistan	1993	200 Rubel = 1 Som	2
Korea Utara	1959	100 Won = 1 Won (baru)	2
Korea Selatan	1962	10 Hwan = 1 Won	1
Laos	1976	20 Kip = 1 Lao Liberation Kip	1

Negara	Tahun	Mata Uang (lama) dan Nilai Mata Uang baru	Jumlah angka nol (0) yang dihilangkan
	1979	100 Liberation Kip = 1 Kip (baru)	2
Latvia	1993	100 Talonu = 1 Litas	2
Letonia	1993	200 Rublu = 1 Lats	2
Macedonia	1993	100 Denari = 1 Denari (baru)	2
Mexico	1993	1.000 Pesos = 1 Peso (baru)	3
Moldova	1993	1.000 Rubel = 1 Leu	3
Morocco	1959	100 Francs = 1 Dirham	2
Nicaragua	1988	1.000 Cordobas = 1 Cordoba (baru)	3
Paraguay	1943	100 Pesos Fuertes = 1 Guarani	2
Peru	1985	1.000 Soles = 1 Inti	3
	1991	1.000.000 Intis = 1 Sol (baru)	6
Polandia	1995	1.000 Zlotych = 1 Zloty (baru)	4
Rumania	1947	2.000 Lei = 1 Leu	4
	2005	10.000 Lei = 1 Leu (baru)	4
Russia	1947	10 Rubel = 1 Ribel (baru)	1
	1961	10 Rubel = 1 Rubel (baru)	1
	1998	1.000 Rubel = 1 Rubel (baru)	3
Serbia & Montenegro	1966	100 Dinars = 1 Dinar (baru)	2
	1990	10.000 Dinars = 1 Dinar (baru)	4
	1992	10 Dinars = 1 Dinar (baru)	1
	1993(Oct)	1.000.000 Dinars = 1 Dinar	6
	1993(Oct)	1.000.000.000 Dinars = 1 Dinar	9
	1994	12.000.000 Dinars = 1 Dinar	6
Sudan	1992	10 Pounds = 1 Dinar	1
Taiwan	1949	40.000 Dolar Taiwan = 1 Dolar Taiwan (baru)	4
Tunisia	1958	1.000 Francs = 1 Dinar	3
Turki	2005	1.000.000 Lirasi = 1 Lirasi (baru)	6
Uganda	1987	100 Shilings = 1 Shilling (baru)	2
Ukraina	1996	100.000 Karbovenets = 1 Hryvnia	5
Uruguay	1975	1.000 Pesos = 1 Peso (baru)	3
	1993	1,000 Pesos = 1 Peso Uruguayo	3
Uzbekistan	1994	1,000 sum-soupons = 1 Sum-note	3
Vietnam	1959	1,000 Dong (north) = 1 new Dong (north)	3
	1975	500 Piastres (sout) = 1 new south Vietnam Dong	2
	1985	10 Dong = 1 new Dong	1

Turki adalah salah satu negara yang sukses melakukan redenominasi mata uangnya. Pemerintah dan otoritas moneter Turki tercatat sukses melakukan redenominasi dengan menghilangkan 6 angka nol pada mata uangnya. Jadi redenominasi yang dilakukan Turki adalah mengubah 1.000.000 lira menjadi 1 lira pada tahun 2005. Kebijakan redenominasi ini dilakukan untuk menekan laju inflasi Turki yang sangat tinggi sejak tahun 1970-an. Inflasi yang tinggi ini menyebabkan nilai ekonomi di negara belahan Eropa tersebut mencapai hitungan triliun, bahkan kuadriliun. Turki meredenominasi mata uang secara bertahap dengan memperhatikan stabilitas perekonomian dalam negerinya. Pada tahap awal, mata uang TL dan YTL beredar secara simultan selama setahun. Kemudian mata uang lama ditarik secara bertahap digantikan dengan YTL. Pada tahap selanjutnya, sebutan 'Yeni' pada uang baru dihilangkan sehingga mata uang YTL kembali menjadi TL dengan nilai redenominasi. Selama tahap redenominasi, keadaan perekonomian tetap terjaga. Inflasi Turki pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 juga tetap stabil di kisaran 8-9%.

Sementara itu, negara-negara seperti Rusia, Argentina, Zimbabwe, Korea Utara, dan Brasil tercatat sebagai negara-negara yang gagal dalam melakukan redenominasi, meski Brazil kemudian berhasil dalam melakukan redenominasi pada tahun 1994. Negara-negara tersebut

memberlakukan redenominasi pada saat yang tidak tepat di mana kondisi perekonomian tidak stabil dan memiliki tingkat inflasi yang tinggi.

Di Rusia, redenominasi bahkan dianggap sebagai instrumen tak langsung (pemerintah merampok kekayaan rakyat). Korea Utara pada akhir tahun 2009 melakukan redenominasi 100 won menjadi 1 won. Namun, saat warga hendak menggantikan uang lama won ke uang baru, stok uang baru tidak tersedia. Brasil sempat mengalami kegagalan melakukan redenominasi yakni pada tahun 1986-1989. Brasil melakukan penyederhanaan mata uangnya dari cruzeiro menjadi cruzado. Namun, kurs mata uangnya justru terdepresiasi secara tajam terhadap dolar AS hingga mencapai ribuan cruzado untuk setiap dolar AS.

Redenominasi bersifat sangat teknis dan butuh kematangan dari seluruh lapisan masyarakat. Terutama untuk mengerti konsep redenominasi yang akan diterapkan, demikian pendapat Kwik Kian Gie (Mantan Menko Perekonomian). Keputusan redenominasi bukan hanya keputusan ekonomi, namun juga keputusan politik. Setelah BI menyelesaikan kajian, bank sentral akan melaporkan ke Presiden. Sehingga keputusannya tak hanya di BI namun juga presiden dan DPR. Karena ini harus dilengkapi perundang-undangan di DPR, ini keputusan semua, ekonomi dan politik, (Budi Rochadi, 2010).

Sanering

Sanering adalah tindakan pemerintah yaitu pemotongan daya beli masyarakat melalui pengurangan nilai uang, namun harga-harga barang tetap, sehingga berakibat pada turunnya daya beli masyarakat. Tindakan pemerintah ini pernah dilakukan di Indonesia yang dikenal dengan peristiwa ‘Gunting Syarifuddin’. Kebijakan pemerintah RI yang dikenal dengan sebutan gunting Syarifuddin. Hal ini dilakukan untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk karena utang menumpuk, inflasi tinggi terus menerus terjadi, dan harga-harga barang dan jasa melambung. Dengan tindakan ini pemerintah sekaligus bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar, menekan inflasi, dan menurunkan harga barang, dan meningkatkan likuiditas kas pemerintah.

Sanering atau pemotongan nilai tukar mata uang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya pada tahun 1965. Sanering di Indonesia terjadi karena ledakan inflasi. Pada waktu itu terjadi inflasi yang mencapai 650% per tahunnya. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia melakukan sanering.

- (a) Sanering pertama di Indonesia dilakukan pada 19 Maret 1950 yang dikenal dengan istilah Gunting Syafrudin, dimana uang kertas betul-betul digunting menjadi dua bagian. Satu bagian dipakai sebagai alat pembayar sah dengan nilai semula. Sedangkan satu bagian yang lain, dan deposito di Bank ditukar dengan obligasi negara yang akan dibayar 40 tahun kemudian dengan bunga 3% per tahun.
- (b) Sanering kedua; (dikenal dengan istilah Sanering Gajah); uang pecahan Rp 1.000 menjadi Rp 100, dan (Sanering Macan) Rp 500 menjadi Rp 50. Deposito lebih dari Rp 25.000 dibekukan. 1 US\$ = Rp 45. Setelah itu nilai mata uang rupiah terus turun terhadap dollar AS, sehingga pada Desember 1965 1US\$ = Rp 35.000.
- (c) Sanering (ketiga); dilakukan pada 13 Desember 1965, nilai Rp 1.000 (uang lama) menjadi Rp 1 (uang baru). Peristiwa ini ikuti depresiasi mata uang Rupiah sehingga ketika terjadi krisis moneter di Asia pada tahun 1997 nilai 1 US\$ menjadi Rp 5.500, dan pada April 1998 ketika Presiden Soeharto lengser nilai 1 US\$ menjadi Rp 17.200. Kebijakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965 bertujuan untuk mewujudkan kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk daerah Provinsi Irian Barat.

Metodologi dan Analisis

Analisis dilakukan dengan membuat perbandingan kebijakan antara Redenominasi dan Sanering. Parameter yang digunakan adalah: (1) Tindakan (Aksi), (2) Pengaruh terhadap harga barang, (3) Daya beli nilai uang terhadap harga barang, (4) Kerugian kebijakan, (5) Tujuan kebijakan, (6) Kondisi saat pelaksanaan, dan (7) Momentum saat pelaksanaan.

Redenominasi vs Sanering

Perbedaan redenominasi dan sanering sangat jelas. Titik berat dari perbedaan keduanya berada pada nilai mata uang dan daya belinya, dimana kebijakan redenominasi sama sekali tidak mengubah nilai mata uang dan daya belinya. Sementara kebijakan sanering mengurangi nilai mata uang terhadap daya belinya atas suatu barang dan jasa, (Wahyu Daniel, 2013).

Tabel 3. Perbandingan Redenominasi dan Sanering

	Redenominasi	Sanering
Aksi	Penyederhanaan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka 0) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut	Pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang
Pengaruh terhadap harga barang	Berpengaruh	Tidak berpengaruh
Daya beli Nilai uang terhadap barang	Tetap	Turun
Kerugian	Tidak	Ya
Tujuan	Mengefisienkan dan menyamankan transaksi Menyetarakan ekonomi dengan negara regional	Mengurangi jumlah uang beredar
Kondisi saat pelaksanaan	Makroekonomi stabil, ekonomi bertumbuh, inflasi terkontrol	Makro ekonomi labil, hiperinflasi
Momentum pelaksanaan	Bertahap, persiapan matang dan terukur	Mendadak, tanpa persiapan

Redenominasi sama sekali berbeda dengan sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pengguntingan mata uang di negara-negara yang kerap mengalami kondisi inflasi tinggi. (Kompas.com, 2013).

Otoritas dan Kebijakan Redenominasi Mata Uang Rupiah

Bank Indonesia merencanakan melakukan redenominasi rupiah karena uang pecahan rupiah (IDR) Indonesia yang terbesar saat ini adalah Rp 100.000. Uang rupiah tersebut mempunyai pecahan terbesar kedua di dunia, karena uang pecahan terbesar pertama di dunia adalah mata uang Vietnam yang mencetak nilai nominal 500.000 Dong. Negara lainnya yang pernah mencetak nilai nominal 100 miliar dolar adalah Zimbabwe.

Bank Indonesia sangat menyakini bahwa redenominasi rupiah tidak akan mengalami nasib tragis layaknya dolar Zimbabwe. Mengapa? Karena kegagalan negara Zimbabwe dalam melakukan redenominasi beberapa waktu yang lalu dipicu oleh tidak terkendalinya tingkat inflasi di negara tersebut.

- (1) Redenominasi diperlukan untuk memperbaiki atau mengatasi inefisiensi yang bisa terjadi akibat makin tingginya waktu dan biaya transaksi yang diperlukan karena nilai transaksi di tengah masyarakat semakin lama semakin besar. Terutama bila transaksi-transaksi yang dilakukan mengandalkan pembayaran tunai.

- (2) Redenominasi membantu mengatasi inefisiensi pembangunan infrastruktur untuk sistem pembayaran nontunai yang biasanya menggunakan biaya besar. Nilai nominal (digit) transaksi makin hari makin besar, dan makin merepotkan. Akibatnya, ditemukan pula kendala dalam pencatatan uang. Semakin besar transaksi, semakin lama pencatatan, dan semakin mahal.
- (3) Redenominasi adalah bentuk (antisipasi) pemerintah dan otoritas moneter Indonesia atas wacana single currency ASEAN, agar mata uang (IDR) rupiah cukup setara dengan mata uang negara ASEAN lainnya. Saat ini, Indonesia dan Vietnam adalah dua negara yang memiliki digit mata uang yang besar di antara negara-negara di kawasan ASEAN.

Bank Indonesia tengah melakukan riset yang akan menjadi acuan awal untuk berangkat ke proses persiapan redenominasi yang memakan waktu sekitar 10 tahun (Caroline Damani, 2010). Kebijakan redenominasi mata uang rupiah yang direncanakan oleh Bank Indonesia (BI) patut dipertimbangkan mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik. Pilihan atas kebijakan ini yang jelas membuat perekonomian makin praktis. Redenominasi memang harus dilakukan sehingga aktivitas ekonomi meningkat. Selain itu perekonomian menjadi praktis sebab nilai uang menjadi tidak terlalu besar digitnya.

Denominasi rupiah saat ini memperlihatkan ‘rendahnya gengsi’ mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Di negara Asean dan bahkan Asia, nilai Rupiah adalah yang kedua terkecil nilainya setelah Vietnam. Angka nol dalam rupiah sudah mengalami ‘inefisiensi’, sehingga sering dalam penulisan harga selalu dipakai ‘denominasi tambahan’, misalnya dalam ribuan atau bahkan jutaan.

Proses Redenominasi biasanya terdiri dari tahap berikut: (a) Sosialisasi; (b) Fase transisi; (c) Penarikan mata uang lama. Karena setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, maka dampak proses redenominasi di setiap negara juga pasti berbeda. Oleh sebab itu dalam kebijakan redenominasi mata uang, hal penting yang harus dilakukan oleh otoritas moneter suatu negara yaitu memastikan bahwa kita akan mendapatkan keuntungan dari kebijakan bank sentral ini.

Landasan Hukum denominasi dan redenominasi mata uang dapat ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang yang ditetapkan oleh DPR bersama dengan Pemerintah. Artinya, tindakan yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan redenominasi mata uang rupiah haruslah dilakukan dalam dua tahap, yaitu (i) pembuatan peraturan yang mempunyai kedudukan kuat oleh Bank Indonesia, diusulkan dalam bentuk undang-undang, dan (ii) penetapan redenominasi itu dengan keputusan Bank Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2009). Dengan demikian, alternatif pemberlakuan redenominasi melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia) secara juridis sah dan cukup kuat.

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan kebijakan redenominasi tersebut, namun sebaiknya Bank Indonesia tidak menentukan sendiri pilihan-pilihan itu. Badan negara lainnya yang mempunyai kewenangan perancangan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan undang-undang adalah Presiden dan DPR. Draf Rancangan Undang-Undang tentang Redenominasi Rupiah itu setidaknya memuat 2 macam norma, yaitu (i) ketentuan-ketentuan yang mengatur (*regeligen*) mengenai berbagai prosedur penerapan kebijakan redenominasi itu beserta segala akibat hukumnya di lapangan melalui aturan peralihan, dan (ii) pernyataan penetapan mulai sejak kapan nilai rupiah yang bersangkutan mengalami redenominasi, dan berapa besar nilai denominasi yang ditetapkan.

RUU Redenominasi telah masuk dalam Prolegnas dan agenda yang bakal dibahas DPR tahun ini. Jika disetujui, mulai 2014 bakal dimunculkan mata uang baru hasil redenominasi, sehingga ada 2 mata uang yang beredar di masyarakat. Setelah itu secara perlahan hingga 2017 atau 2019 redenominasi dilakukan dan mata uang rupiah lama akan hilang di masyarakat.

Simpulan

Akumulasi inflasi adalah faktor utama yang mendorong dilakukannya redenominasi dan sanering terhadap mata uang suatu negara tertentu. Tindakan atau kebijakan redenominasi maupun sanering terhadap mata uang memiliki arti penting dalam sistem moneter suatu negara; tanpa kecuali negara maju, negara berkembang atau negara miskin sekalipun, termasuk Indonesia.

Redenominasi dan sanering sebagai kebijakan otoritas moneter bersifat sangat teknis dan butuh kematangan otoritas dan pemahaman dari seluruh lapisan masyarakat. Terutama untuk mengerti konsep dan aplikasi. Sejarah mencatat mata uang rupiah pernah mengalami sanering tiga (3) kali dan berdampak negatif, sehingga kekhawatiran yang sama muncul terhadap dampak redenominasi.

Keputusan redenominasi atau tidak adalah kewenangan otoritas moneter Indonesia. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk memberlakukan atau tidak kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, prosesnya diserahkan kepada otoritas moneter Indonesia, karena otoritas moneter diberi kewenangan sesuai peraturan yang berlaku, sambil memperhitungkan efek atau dampak lain yang mungkin timbul. Disayangkan bahwa momentum beberapa tahun yang lalu terlewatkan apalagi saat ini Rupiah terjerembab terhadap US Dollar.

Keputusan redenominasi bukan hanya keputusan ekonomi, namun juga keputusan politik dan redenominasi tidak selamanya sukses. Redenominasi sangat mungkin gagal atau menghasilkan buah yang buruk seperti dialami oleh beberapa negara yang melakukan redenominasi. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan tahapan-tahapan redenominasi; sosialisasi, transisi, dan penarikan mata uang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyan Mohamad, 2013. Belajar redenominasi dari Turki, Rabu, 20 Februari 09:06:00, Merdeka.com
- Duca Iona, 2012. The National currency Re-denomination Experience in Several Countries-A Comparative Analysis, University Bucharest.
- Fusion Analytics, 2012. The Bad & Good of Currency Redenomination, December 30.
- Hadi Suprpto, Nur Farida Ahniar, 2010. Mengapa BI Lempar Wacana Penyederhanaan Uang Wacana ini perlu dilemparkan saat ini karena proses denominasi membutuhkan waktu 10 tahun. Selasa, 3 Agustus, 18:02, © VIVA.co.id
- Jimly Asshiddiqie, 2009. Redenominasi Konstitusional Mata Uang Rupiah, Jakarta. 21 Oktober, wikipedia.com
- Kwik Kian Gie, 2013. Redenominasi belum mendesak. Senin, 28 Januari 20:45:00 Merdeka.com.
- Sri Wiyanti. 2013. BI prioritaskan UU JPSK daripada redenominasi, Kamis, 25 Juli 13:47:39 Merdeka.com
- Wahyu Daniel, 2013. Negara yang Sukses dan Gagal Melakukan Redenominasi, Detikfinance.
- Wall Street Fool, 2013. Redenomination Risk – The Ongoing Threat To World Peace by Posted on June 7.